

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI SOELISTIJONO, S. SOS
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
3. NHK : 714123

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.460.000.000**

1. Tanah Seluas 2.34 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 1.315 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 1385 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2670 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 165 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 860 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 825 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 175.000.000
8. Tanah Seluas 820 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 175.000.000
9. Tanah Seluas 825 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 175.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/100 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 98.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



9.000.000

4. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

5. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND LG/KF83 Tahun 2002, HASIL

SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 42.510.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 831.657.739

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.432.167.739

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.432.167.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.